

## PEMANFAATAN KELOMPOK SOSIAL PADA PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN PINRANG

Muh. Iqbal Latief<sup>1</sup>, Andi Ahmad Hasan Tenriliweng<sup>2</sup>, Atma Ras<sup>3</sup>, Hariashari Rahim<sup>4</sup>,  
Marta Suharsih<sup>5</sup>, Pratiwi Wulandari<sup>6</sup>

<sup>123456</sup>Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin  
Email Korespondensi: [muhilberkelana@gmail.com](mailto:muhilberkelana@gmail.com)

### Abstract

*This community service focuses on utilizing social groups to address stunting in Pinrang Regency, facing issues of suboptimal use of social groups, lack of community knowledge, and underutilized roles of social groups and village governments. It aims to contribute solutions through education and community empowerment, improve child and family social welfare, and map social group potential. Using Participatory Rural Appraisal (PRA), results increased understanding of social organizations' importance and encouraged support for families with stunting. However, social group utilization remains constrained by budget policies, especially in urban villages. Stunting budget policies differ between villages and urban villages, with village funds allowing social group facilitation, while urban village budgets face policy constraints despite possible available funds. In conclusion, social group participation is crucial for effective stunting management but is hindered by differing village and urban village budget policies.*

**Keywords:** *Stunting; Social group; Budget policy; community empowerment*

### Abstrak

Pengabdian masyarakat ini fokus pada pemanfaatan kelompok sosial untuk menangani stunting di Kabupaten Pinrang, menghadapi masalah belum optimalnya pemanfaatan kelompok sosial, kurangnya pengetahuan masyarakat, dan belum maksimalnya peran kelompok sosial dan pemerintah desa. Tujuannya adalah berkontribusi pada solusi melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial anak dan keluarga, serta memetakan potensi kelompok sosial. Menggunakan metode Partisipatory Rural Appraisal (PRA), hasilnya meningkatkan pemahaman pentingnya peran organisasi sosial dan mendorong pendampingan keluarga dengan stunting. Namun, pemanfaatan kelompok sosial masih terkendala kebijakan anggaran, terutama di kelurahan. Kebijakan anggaran untuk stunting berbeda antara desa dan kelurahan, di mana dana desa memungkinkan fasilitasi kelompok sosial, sedangkan anggaran kelurahan terkendala kebijakan meski anggaran mungkin tersedia. Kesimpulannya, partisipasi kelompok sosial penting untuk efektivitas penanganan stunting, namun masih terhambat perbedaan kebijakan anggaran desa dan kelurahan.

**Kata Kunci:** Stunting; Kelompok sosial; Kebijakan anggaran; Pemberdayaan masyarakat

Submitted: 2024-11-03

Revised: 2024-11-20

Accepted: 2024-12-13

### Pendahuluan

Masalah stunting (kondisi gagal tumbuh pada anak Balita akibat kekurangan gizi kronis 1.000 hari pertama kehidupan/HPK) di Sulawesi Selatan, masih tergolong tinggi. Angka-angka statistik menunjukkan bahwa persentase stunting cukup tinggi. Tahun 2020 angka stunting Sulsel sebesar 30 %, kemudian tahun 2021 turun menjadi 27,4% dan tahun 2022 targetnya 21,59% (Sulsel, 2024). Banyak hal yang mendasari masih tingginya angka stunting di Sulsel, dari berbagai hasil studi menyimpulkan bahwa ada dua hal utama yang penyebab tingginya stunting yaitu masalah kemiskinan dan rendahnya kemampuan orang tua dalam proses pengasuhan anak. Menyebabkan tumbuh kembang anak, menjadi terganggu (Wahyuni & Fitrayuna, 2020).

Salah satu daerah di Sulsel yang juga memiliki prevalensi angka stunting adalah Kabupaten Pinrang. Walaupun tidak sebesar rata-rata Sulsel, namun dengan kondisi wilayah dengan dataran rendah yang didominasi oleh areal persawahan, perbukitan dan pegunungan, maka kabupaten tersebut juga dikategorikan sebagai salah satu dari 24 kabupaten di Sulsel dengan angka stunting yang cukup tinggi. Khusus di Kabupaten Pinrang, pada tahun 2021 angka prevalensi stunting

sebanyak 24,5%, kemudian tahun 2022 turun menjadi 20,9%. Meski mengalami penurunan tetapi belum sepenuhnya signifikan, hanya mencapai angka 3,6% dalam kurun waktu satu tahun. Sedang pada tahun 2024, prevalensi angka stunting di Kabupaten Pinrang berada pada persentase 17,6% (TPPS Sulsel, 2024).

Perwujudan visi pemerintah Kabupaten Pinrang yang lebih sejahtera dengan upaya yakni mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik pada seluruh sektor kehidupan masyarakat, terpenuhi hak dasar masyarakat, lingkungan bersih, aman, damai dan nyaman, layanan publik lebih berkualitas dan terjamin pemerintah yang Good Governance dan Clean Government. Peran yang di lakukan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Pinrang sangat penting namun belum didukung oleh kemampuan yang memadai. Saat ini masalah tingginya angka stunting di Kabupaten Pinrang, masih menjadi masalah serius dalam pembangunan daerah berkenaan dengan masalah kesehatan (Herni et al., 2024). Bahkan dalam relitasnya, kondisi ini lebih diperparah dengan kenyataan bahwa tingkat kemiskinan dan pola perilaku di kalangan orang tua masih sangat rendah (Rahman, 2017).

Perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pinrang telah dilakukan dengan menganut prinsip bottom up. Pemerintah kabupaten melakukan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) mulai dari tingkat desa sebagai bahan untuk menyusun program penurunan angka stunting Kabupaten Pinrang secara keseluruhan. Akan tetapi karena pemerintahan tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam memainkan perannya sebagai katalisator pembangunan maka program tersebut menjadi kurang maksimal (Zaman et al., 2022).

Berdasarkan permasalahan terkait yakni belum maksimalnya peran pemerintahan dalam mengatasi persoalan penurunan stunting, maka diperlukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan pemanfaatan kelompok sosial dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Pinrang. Diperlukan suatu Lembaga penurunan angka stunting oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang merupakan suatu kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat ikut serta atau menjadi basis utama dan terdepan dalam upaya penurunan angka stunting, demi terjaminnya kualitas perlindungan dan kesejahteraan anak-anak di Kabupaten Pangkep.

Oleh karena itu, peran lembaga untuk memberi kontribusi solusi terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang khususnya intervensi dari lembaga perguruan tinggi dalam memberikan edukasi dan pemberdayaan kepada masyarakat, terutama yang rentan terhadap permasalahan stunting. Dengan dasar tersebut, maka Universitas Hasanuddin melakukan pengabdian pada masyarakat khususnya pemanfaatan kelompok- kelompok sosial dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Pinrang.

Berkenaan dengan prevalensi angka stunting yang cenderung fluktuatif, telah banyak digeluti oleh berbagai peneliti dalam menelaah permasalahan stunting sebagai bahan rujukan dalam memotret permasalahan stunting. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Gafur et al. (2020) berdasarkan hasil identifikasi beberapa artikel dapat disimpulkan bahwa risiko terjadinya stunting di Sulawesi Selatan secara konsisten adalah status sosial ekonomi atau hal yang terkait dengan kemiskinan keluarga. Selain itu dipengaruhi pula terhadap pola asuh dalam keluarga berupa kebiasaan pengasuhan pemberian kasih sayang, kepedulian terhadap kebersihan anak dan interaksi psikologis anak.

Hal lain diungkap oleh penelitian Kurniawati et al. (2022) menggambarkan bahwa; masalah penanganan stunting di Sulawesi Selatan walaupun sudah dilakukan secara masif dan dipayungi oleh berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten/Kota, namun masih terdapat sejumlah hambatan. Antara lain antusias warga untuk datang ke posyandu masih sangat rendah selain itu juga terdapat partisipasi dan tingkat kepedulian yang kurang serta pengetahuan mengenai stunting yang masih sangat rendah (Angraini et al., 2023). Itulah sebabnya masalah stunting di Sulawesi Selatan sangat di pengaruhi oleh kualitas asupan zat gizi, status kesehatan secara umum, kondisi sosial ekonomi dan pola asuh

balita. Karena itu perlu peran serta multisektor untuk melaksanakan pekerjaan dan penanganan stunting.

### **Metode**

Pengabdian kepada masyarakat ini dipusatkan di Kelurahan Tirong, Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) Kabupaten Pinrang dengan diikuti oleh kurang lebih 30 perwakilan organisasi sosial se Kecamatan Tiroang dalam kegiatan sosialisasi.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan teknik dan cara pemetaan partisipatif melalui materi, metode dan teknik sebagai berikut:

1. Materi : Pemetaan Potensi dan Masalah
2. Metode : Partisipatory Rural Appraisal (PRA)
3. Teknik : Pemetaan desa, kelender musim, penelusuran desa, rangking kesejahteraan, bagan hubungan kelembagaan, bagan perubahan dan kecenderungan, analisa kehidupan, diagram alur dan penentuan angka rangking.

Berdasarkan metodologi diatas, bertujuan untuk merubah proses evaluatif menjadi perilaku/tindakan atau mampu mendesain perencanaan berbasis komunitas secara partisipatif.

### **Hasil dan Pembahasan**

Upaya percepatan penurunan stunting telah menjadi komitmen dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 19 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting, target yang harus kita capai pada tahun 2024 adalah 14% (Sulsel, 2024). Juga telah diperkuat dengan sejumlah regulasi maupun peraturan daerah di tingkat kabupaten/kota termasuk Kabupaten Pinrang, namun masalah stunting masih menjadi persoalan serius dalam bidang kesehatan masyarakat. Salah satu alasannya karena tingkat partisipasi, kepedulian, perilaku sosial masyarakat dan pemanfaatan kelompok sosial masih belum berkontribusi positif terhadap penurunan angka stunting.

Mengingat masalah stunting tidak hanya merupakan masalah kesehatan, tetapi banyak faktor yang mempengaruhi, baik faktor sosial maupun budaya yang berkontribusi pada stunting dan dalam mengembangkan intervensi yang efektif untuk menangani masalah ini. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan stunting tidak hanya melibatkan faktor biologis dan kesehatan, tetapi juga faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi kesehatan anak.

Permasalahan stunting tidak mutlak juga terjadi pada keluarga kurang mampu/miskin, namun diakui bahwa keadaan ekonomi (miskin) berkorelasi positif terhadap stunting. Akan tetapi, kondisi lain yang harus disadari adalah peranan pola asuh (perilaku) yaitu kebiasaan pemberian makan, kebiasaan pengasuhan, kebiasaan kebersihan baik pada keluarga miskin maupun keluarga mampu. Sehingga, perbaikan permasalahan stunting dengan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan pada upaya peningkatan pengetahuan masyarakat melalui upaya-upaya preventif dan promotif dengan merubah kebiasaan-kebiasana keluarga yang kurang baik dan mengambil manfaat secara positif yang dilakukan ibu dalam rangka meningkatkan status gizi balita sehingga dapat meminimalisir resiko kejadian stunting.

Inisiatif masyarakat dalam menyelesaikan masalah stunting, masih sangat minim. Indikasinya, karena kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat belum berperan aktif untuk membantu menyelesaikan masalah masyarakatnya. Termasuk di Kabupaten Pinrang, pemanfaatan kelompok-kelompok sosial belum berperan aktif. Selama ini, yang berperan dalam mensosialisasikan dan melaksanakan kegiatan penurunan angka stunting dilakukan oleh struktur kelembagaan formal,

seperti Tim Pendamping Keluarga (TPK) dari BKKBN, Kader Pembangunan Manusia (KPM) dari Dinas Sosial, Bidan Desa dari Dinas Kesehatan dan pendamping masyarakat lainnya yang kesemuanya dibentuk oleh perangkat daerah. Padahal fungsi kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat salah satunya adalah menjadi agen dan channeling dalam membantu pemerintah menyelesaikan masalahnya, termasuk stunting.

Disamping itu, realitas yang turut membelenggu pada pemanfaatan kelompok sosial guna penurunan angka stunting di Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang masih terkendala kebijakan pemerintah. Kebijakan terkait anggaran fasilitasi bagi kelompok sosial yang ada di kelurahan tersebut masih terkendala. Padahal, penanganan stunting tanpa partisipasi khususnya kelompok sosial masyarakat cenderung menjadi kurang efektif. Terungkap, kebijakan anggaran yang berkaitan dengan stunting berbeda antara desa dan kelurahan. Pada program dan anggaran dana desa, dimungkinkan untuk memberi fasilitasi khususnya pada kelompok-kelompok sosial. Sedangkan pada anggaran kelurahan, hal tersebut tidak dimungkinkan karena terkendala kebijakan, walaupun kemungkinan anggaran untuk fasilitasi kelompok sosial tersedia.

Realisasi pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Pinrang tersebut memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran organisasi sosial dalam membantu mengatasi masalah stunting di wilayahnya masing-masing. Selain itu, organisasi sosial khususnya organisasi perempuan untuk melakukan pendampingan berkala terhadap keluarga yang mengalami stunting.

### **Kesimpulan**

Kegiatan sosialisasi memberi pemahaman tentang pentingnya peran organisasi sosial dalam membantu mengatasi masalah stunting. Selain itu, mendorong organisasi sosial khususnya organisasi perempuan untuk melakukan pendampingan berkala terhadap keluarga-keluarga yang mengalami stunting.

Realitas yang turut membelenggu pada pemanfaatan kelompok sosial guna penurunan angka stunting di Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang masih terkendala kebijakan pemerintah. Kebijakan terkait anggaran fasilitasi bagi kelompok sosial yang ada di kelurahan tersebut masih terkendala. Padahal, penanganan stunting tanpa partisipasi khususnya kelompok sosial masyarakat cenderung menjadi kurang efektif. Terungkap, kebijakan anggaran yang berkaitan dengan stunting berbeda antara desa dan kelurahan. Pada program dan anggaran dana desa, dimungkinkan untuk memberi fasilitasi khususnya pada kelompok-kelompok sosial. Sedangkan pada anggaran kelurahan, hal tersebut tidak dimungkinkan karena terkendala kebijakan, walaupun kemungkinan anggaran untuk fasilitasi kelompok sosial tersedia.

### **Daftar Pustaka**

- Angraini, D. I., Carolia, N., Tjiptaningrum, A., & Kurniati, I. (2023). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemenuhan Gizi Anak Berbasis Konsumsi Pangan sebagai Upaya Pencegahan Stunting. *Poltekita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 531–540.
- Gafur, A., Azwar, M., & Yulis, D. M. (2020). Pengetahuan Ibu Balita Dalam Pengendalian Stunting Di Sulawesi Selatan. *UNM Environmental Journals*, 3(2), 60–68.
- Herni, H., Tahir, N., & Arfah, S. R. (2024). Collaborative Governance: Membangun Solusi Bersama Dalam Penanggulangan Stunting. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 57–74.
- Kurniawati, T., Rusdiyanti, E., & Rahayu, A. P. (2022). *Upaya Pencegahan Stunting melalui Pendampingan dan Rembuk Stunting di Desa Alatengahe Kecamatan Batimurung Kabupaten Maros Sulawesi Selatan*. 1(1), 112–118.

- Rahman, H. (2017). Potret pertumbuhan ekonomi, kesenjangan dan kemiskinan di Indonesia dalam tinjauan ekonomi politik pembangunan. *Ilmu Dan Budaya*, 40(55).
- Sulsel, B. (2024). *Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting*. Bappelitbangda Sulsel. <https://bappelitbangda.sulselprov.go.id/detailpost/aksi-konvergensi-percepatan-penurunan-stunting>
- TPPS Sulsel. (2024). *Laporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Wahyuni, D., & Fitrayuna, R. (2020). Pengaruh sosial ekonomi dengan kejadian stunting pada balita di desa kwalu tambang kampar. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(1), 20–26.
- Zaman, N., Octo, C. W., Dhora, S. T., Yuliaty, F., & Prasetyo, I. (2022). Manajemen sdm perangkat desa dan dampaknya terhadap pertumbuhan umkm di indonesia. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(2), 107–115.